

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agroforestri merupakan suatu sistem pertanian yang mengombinasikan tanaman tahunan dengan tanaman semusim atau ternak dalam satu unit lahan. Dalam sistem ini, petani berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengaturan penggunaan lahan tersebut (Wulandari, Harianto, & Novasari, 2020). Dalam pelaksanaannya, agroforestri tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan biofisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang seiring waktu. Sistem ini menggabungkan tanaman tahunan, tanaman semusim, dan ternak dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi, menciptakan hubungan yang menguntungkan di antara elemen-elemen tersebut.

Pendekatan ini menghasilkan sistem pertanian yang tidak hanya lebih produktif, tetapi juga berkelanjutan, dengan memaksimalkan penggunaan lahan secara efisien dan menjaga keseimbangan lingkungan (Gassner & Dobie, 2022). Konsep agroforestri telah dikenal sejak tahun 1970 sebagai sistem yang mendukung keberlanjutan ekologis. Bahkan, praktik ini telah diterapkan oleh petani selama ribuan tahun dengan mengintegrasikan tanaman dan ternak untuk meningkatkan manfaat ekonomi serta menjaga stabilitas ekosistem.

Di Indonesia, sebagian besar penduduk desa sudah lama mengadopsi praktik agroforestri. Praktik ini telah diterapkan di wilayah Pulau Jawa, terutama pada kawasan yang mengembangkan sistem pertanian menetap, yang dikenal dengan istilah Tumpang Sari sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1773. Agroforestri juga diterapkan di kawasan hutan, seperti dalam bentuk tumpang sari dan komplangan, serta di lahan pertanian seperti penghijauan, karangkiri, dan tanaman pekarangan. Sementara itu, di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya, agroforestri dijalankan dengan menanam tanaman keras seperti kopi, karet, dan kemiri di ladang yang ditinggalkan atau dipelihara bersama dengan tanaman ladang lainnya (Rahmanta Setiahadhi, 2021). Praktik agroforestri ini tidak hanya

memperkaya keanekaragaman tanaman, tetapi juga memberikan berbagai fungsi seperti mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung Daerah Aliran Sungai (DAS), mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, dan mempertahankan lahan secara berkelanjutan (Wulandari et al., 2020).

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-15, yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem daratan secara berkelanjutan, agroforestri berperan penting dalam pengelolaan hutan yang lestari, pencegahan penggurunan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Menurut ICRAF CIFOR, praktik agroforestri dapat mengurangi erosi tanah hingga 50% dan meningkatkan kandungan karbon tanah hingga 21%, menjadikannya strategi yang efektif dalam mendukung pencapaian TPB, khususnya dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi lingkungan (Icraf-Cifor, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam upaya konservasi lingkungan adalah tingginya tingkat produktivitas pertanian yang dicapai melalui pendekatan konvensional. Meskipun mampu meningkatkan hasil secara signifikan, praktik ini seringkali membawa dampak ekologis yang serius, seperti degradasi dan erosi tanah, pencemaran badan air, serta penurunan debit aliran sungai. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang besar emisi gas rumah kaca, yaitu sekitar 20–40% dari total emisi global. Ketergantungan pada input kimia, pembukaan lahan secara masif, serta pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan memperparah kerusakan ekosistem, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas pertanian intensif. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi di kawasan dengan kerentanan lingkungan tinggi, seperti daerah hulu dan kawasan perbukitan.

Menurut hasil sensus pertanian 2023, provinsi Jawa Barat, merupakan provinsi dengan jumlah petani hortikultura terbesar ke tiga se Indonesia, dengan jumlah petani sebanyak 1,29 juta petani, setelah Provinsi Jawa Timur (2,07 juta petani), dan Provinsi Jawa Tengah (1,9 juta petani). Lima komoditas sayuran semusim dengan produksi terbesar secara berurutan adalah tomat, kentang, kubis, cabai kering, dan bawang merah.

**Tabel 1. 1 Luas Panen, Produksi, dan Hasil per Kuintal/Hektare
Tanaman Sayuran dan Buah Semusim, 2022-2023**

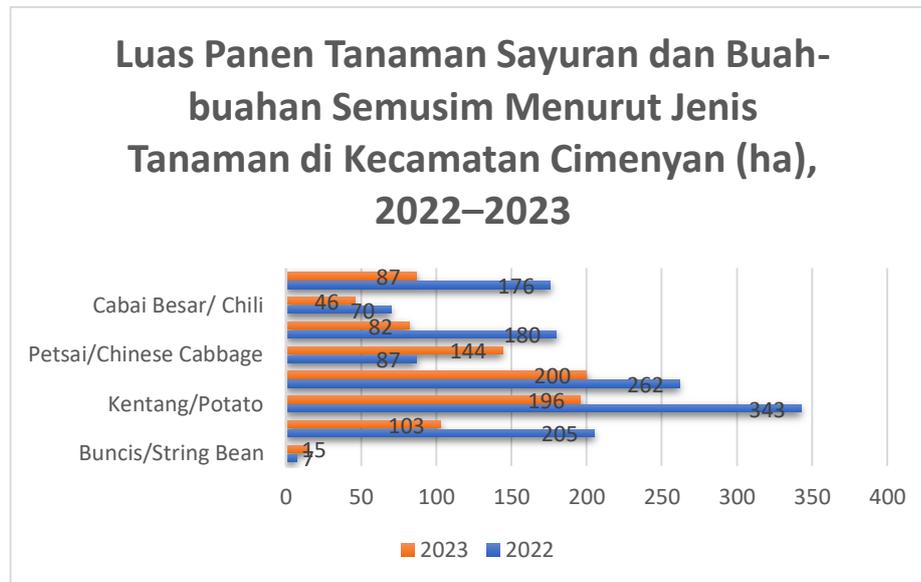
No	Komoditas/ <i>commodity</i>	2022	2023	No	Komoditas/ <i>commodity</i>	2022	2023
		Produkti vitas (Kw/Ha)	Produkti vitas (Kw/Ha)			Produkti vitas (Kw/Ha)	Produkti vitas (Kw/Ha)
1	Bawang Daun	137,82	140,67	14	Jamur tiram	0,16	0,31
2	Bawang Merah	111,17	112,03	15	Jamur merah	0,06	0,07
3	Bawang putih	111,07	98,86	16	Jamur lainnya	0,60	0,54
4	Kembang kol	140,87	141,77	17	Kacang panjang	141,85	131,24
5	Kentang	222,20	228,76	18	Kangkung	87,11	88,17
6	Kubis	217,12	219,58	19	Metimun	187,11	175,23
7	Petsai sawi	147,62	148,68	20	Labu siam	533,44	748,68
8	Wortel	201,54	201,83	21	Paprika	335,05	459,09
9	Bayam	62,21	60,77	22	Terung	215,18	219,39
10	Buncis	186,76	180,68	23	Tomat	282,21	279,63
11	Cabai besar	139,47	140,36	24	Melon	147,64	136,74
12	Cabai rawit	130,22	137,89	25	Semangka	189,59	145,92
13	Cabai Keriting	141,96	140,93	26	Stroberi	643,37	572,07

Sumber: BPS-STATISTICS JAWA BARAT PROVINCE

Salah satu daerah penyumbang produktivitas tanaman semusim yang tinggi adalah Kabupaten Bandung. Beberapa jenis tanamannya yaitu bawang daun dengan produksi sebanyak 571.957,00 kuintal mencakup 35,06 persen dari keseluruhan produksi provinsi Jawa Barat, lalu bawang merah dengan produksi sebanyak 655.147,00 kuintal mencakup 36,53 persen dari keseluruhan produksi provinsi Jawa Barat, dan masi banyak lainnya. Sektor pertanian Kabupaten Bandung dihasilkan dari beberapa kecamatan potensi pertanian di Kabupaten Bandung, diantaranya Kecamatan Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Paseh, Cimenyan, dan beberapa kecamatan lain yang turut menyumbang produksi walau dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Dalam hal ini, kecamatan cimenyan merupakan salah satu kecamatan yang menyumbang produktivitas tanaman semusim yang tinggi. Kecamatan Cimenyan memiliki Komoditas Hortikultura 5 terbesar pada tahun 2023 yaitu tanaman Kubis sebesar 200 ha, kentang 196 ha, petsai 144 ha, cabe rawit 103 ha dan cabai keriting 87 ha.

Tabel 1. 2 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim



Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-*Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH* (2023)

Tingginya produktivitas tanaman sayuran di Kecamatan Cimenean, menjadikan Kecamatan Cimenean sebagai lahan yang sangat kritis. Tingkat kritis lahan ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, mulai dari sangat kritis, kritis, agak kritis, hingga potensial kritis.

Tabel 1. 3 Sebaran Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Bandung Tahun 2023

Kab.	Fungsi Kawasan	Kekritisian Lahan (Ha)		Luas Total (Ha)
		Kritis	Sangat Kritis	
Bandung	Areal Penggunaan Lahan	5.994,03	28.994,57	34.988,61
	Kawasan Hutan	2.505,22	9.185,02	11.690,23
Jumlah Total		8.499,25	38.179,59	46.678,84

Sumber : Singmangfaat Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2023)

Kecamatan Cimenean dalam hal ini dikategorikan sebagai lahan yang sangat kritis. sebagai salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara (KBU), kecamatan Cimenean memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah resapan air. Namun, kawasan ini menghadapi tantangan besar terkait alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016, KBU seharusnya dijaga sebagai kawasan konservasi untuk melindungi daerah resapan air dan fungsi ekosistem

lainnya. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian wilayah KBU, termasuk Kecamatan Cimenyan, telah mengalami degradasi lingkungan yang signifikan, yang ditandai dengan meningkatnya luas lahan kritis dan berkurangnya daya dukung lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, luas rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung termasuk salah satu daerah dengan kontribusi yang signifikan. Data ini mencerminkan bahwa adanya upaya program rehabilitasi di tingkat provinsi untuk menangani lahan kritis dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Tabel 1. 4 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis/Penanaman Pohon Kabupaten Bandung



Sumber: Open Data Jabar Prov (2023)

Berdasarkan data di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 Kabupaten Bandung memiliki nilai tertinggi terkait rehabilitasi lahan kritis/penanaman pohon dengan total luas 9.543,27 hektare dengan kota Bekasi yang memiliki nilai terendah yaitu 0 hektare. Hal ini seharusnya menjadi Langkah yang baik untuk menangani permasalahan lahan kritis, dengan Kabupaten Bandung yang memiliki nilai tertinggi. Namun, perbandingan luas penanaman pohon untuk

rehabilitasi lahan kritis yang seluas 9.543,27 hektare di Kabupaten Bandung masih jauh dengan total luas lahan kritis di Kabupaten Bandung yang cukup besar jumlahnya yaitu 46.678,84 hektar. Hal ini menyebabkan permasalahan lahan kritis di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung belum teratasi, salah satunya kecamatan cimenyan.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada Pemkab Bandung untuk menerapkan model pertanian agroforestri, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dodit Panca Pana, dalam rapat kerja di Setda Kabupaten Bandung, Soreang, pada 16 Januari 2024. Selaras dengan gagasan tersebut, pada 19 hingga 27 Januari 2024, Dinas Kehutanan Jawa Barat telah melaksanakan program penanaman di Kawasan Bandung Utara, termasuk di Kecamatan Cimenyan, dengan total 27.240 bibit yang ditanam, mencakup area seluas 68 hektare. Bibit yang ditanam meliputi jenis kayu-kayuan seperti Mahoni Uganda, Albasia, dan Suren, serta bibit produktif seperti Kopi, Alpukat, Jengkol, dan Durian (Adityia, 2024).

Namun, di lapangan ditemukan bahwa beberapa petani kurang tertarik dengan bibit pohon besar atau kayu-kayuan karena dinilai kurang memberikan manfaat ekonomi. Sebaliknya, mereka lebih menyukai bibit buah seperti nangka, sirsak, matoa, durian, sukun, jeruk, jambu, dan pepaya, karena jenis tanaman ini dapat memberikan hasil yang langsung dirasakan manfaatnya. Petani berpendapat bahwa dalam melaksanakan program penghijauan, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penghijauan, tetapi lebih bijak dalam memahami kebutuhan para petani (Supriatna Enton, 2024).

Penerapan agroforestri di Kecamatan Cimenyan masih menghadapi berbagai kendala, mengingat adanya resistensi dari sebagian petani terhadap program rehabilitasi yang bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat lokal. Sebagian petani menolak bibit pohon besar karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan, tidak sedikit yang hanya menanam untuk memenuhi instruksi tanpa benar-benar berkomitmen terhadap program tersebut. Seiring dengan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 yang menegaskan pentingnya menjaga kawasan Bandung Utara sebagai daerah

konservasi, diperlukan strategi implementasi yang tidak hanya mengutamakan rehabilitasi lahan, tetapi juga memberdayakan petani sebagai pelaku utama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi program agroforestri di Kecamatan Cimenyan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program tersebut diterapkan dan kontribusinya dalam mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Implementasi Program Agroforestri dalam Mendukung Pengelolaan Lahan Berkelanjutan di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung".

B. Identifikasi Masalah

1. Produktivitas tanaman semusim yang tinggi
2. Luasnya lahan kritis di Kecamatan Cimenyan
3. Ketidaksesuaian jenis tanaman dengan kebutuhan petani
4. Pendekatan yang *top-down*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung?
2. Bagaimana organisasi pelaksana program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung?
3. Bagaimana penerima manfaat program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung?g?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis organisasi pelaksana program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerima manfaat program agroforestri di Kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya dengan mengaplikasikan model implementasi program David C. Korten dalam konteks agroforestri. Penelitian ini juga berupaya menambah referensi ilmiah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lahan berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan pengurangan lahan kritis dan keberlanjutan ekosistem di wilayah tropis seperti Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian akademis yang dapat membantu mengintegrasikan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dalam pelaksanaan program pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan strategi implementasi program agroforestri yang lebih efektif di Kecamatan Cimenyan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya agroforestri dalam mendukung rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan kesadaran mereka terhadap manfaat ekologis dan ekonomis yang dapat diperoleh dari program tersebut. Bagi pelaksana program, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan *evaluasi* untuk mengatasi berbagai hambatan teknis dan sosial dalam implementasi program agroforestri.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi program agroforestri di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Cimenyan, dengan pendekatan yang mengintegrasikan Grand Teori Administrasi Publik dari Nicholas Henry, Teori Kebijakan Publik dari Tomas R. Dye, dan Model Implementasi Program dari David C. Korten. Kerangka berpikir ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pengelolaan lahan dan program agroforestri

diterapkan dalam konteks pengelolaan lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Kebijakan Publik

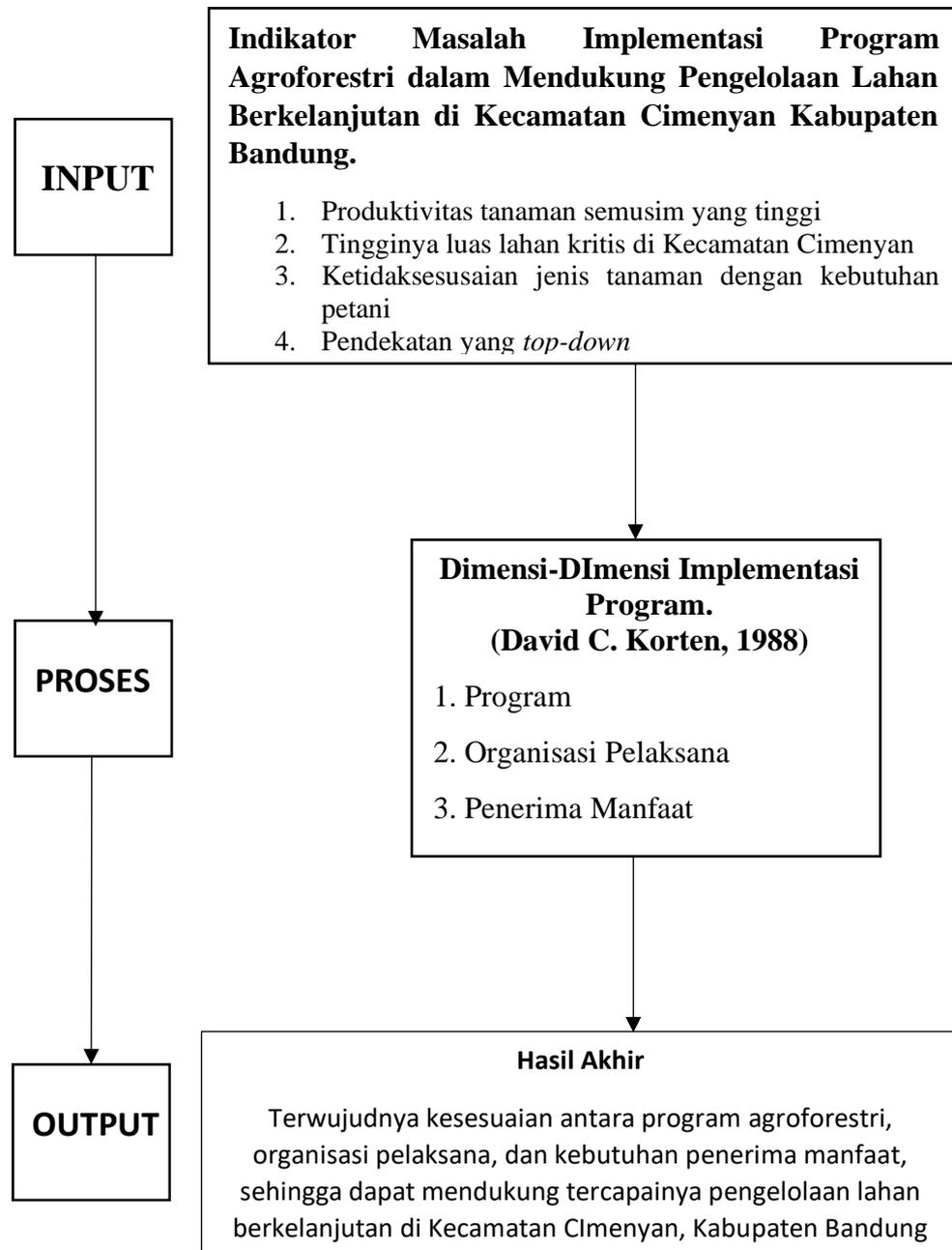
Menurut (Henry & Nicholas, 2016) administrasi publik merupakan perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang dilayani. Dalam konteks ini, teori administrasi publik memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pemerintah berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agroforestri. Penekanan pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat mencakup aspek koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi program. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana program agroforestri mencerminkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut (Dye et al., 2017) kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana kebijakan agroforestri dirumuskan, diprioritaskan, dan diterapkan oleh pemerintah di Kecamatan Cimenyan. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik mencakup identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam kerangka ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah memilih untuk mendukung agroforestri sebagai solusi terhadap permasalahan lingkungan, seperti lahan kritis, degradasi tanah, dan risiko banjir.

Model Implementasi Program (Korten & Sjahrir, 1988) digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang sudah dirancang dapat diimplementasikan di lapangan. Model ini menekankan pentingnya kebutuhan penerima manfaat, proses pengambilan keputusan, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan program. Dalam konteks agroforestri, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana program agroforestri yang diterapkan di Kecamatan Cimenyan telah sesuai de

ngan kebutuhan petani dan apakah program tersebut dapat dijalankan secara efektif oleh organisasi pelaksana. Peneliti juga akan mengkaji apakah program agroforestri ini telah mencakup semua elemen penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penyediaan bibit tanaman, pelatihan kepada petani, dan dukungan teknis.





Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2025)